



VISI

*"Pekanbaru Berbudaya, Maju
dan Sejahtera"*

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU 2025 Laporan Akhir



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Pekanbaru Tahun 2025. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan dan tuntutan publik melalui evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan yang telah dilakukan. Salah satu cara untuk memperoleh hasil evaluasi adalah dengan meminta penilaian publik terhadap kualitas pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat.

Laporan IKM dibuat untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Masukan dari masyarakat berupa penilaian obyektif atas pelayanan publik akan diolah dan kemudian dijadikan acuan dalam menyusun program kerja pada periode selanjutnya. Selain itu, kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Pekanbaru Tahun 2025 ini diharapkan dapat mengetahui indikator apa saja yang perlu adanya perbaikan demi meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak karna telah melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Pekanbaru Tahun 2025 dan tersusunnya laporan ini. Kemudian kerja samanya untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan terutama pada unsur yang dipersepsikan lemah oleh pengguna layanan berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan. Akhirnya, demi penyempurnaan hasil akhir nantinya sumbang saran dan pemikiran dari berbagai pihak akan sangat berguna.

Pekanbaru, April 2025



PT. MULTI SARANA
KONSULTAN

data yang diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan.

Survey kepuasan masyarakat ini menggunakan pendekatan metode non probability sampling dengan teknik sampel jenuh dalam pemilihan sampelnya. Dalam metode ini, seluruh unsur dalam populasi yang menjadi subjek penelitian digunakan sebagai sampel. Teknik ini dipilih karena jumlah populasi relatif kecil, sehingga memungkinkan untuk menjadikan semua anggota populasi sebagai responden tanpa perlu pemilihan secara acak atau perhitungan jumlah sampel minimum secara matematis.

Keseluruhan Jumlah sampel untuk seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru berjumlah 9355 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Sampel Dinas/Badan/Kecamatan

DATA POPULASI DAN SAMPEL SKM TH.2025

No.	Perangkat Daerah	Responden
1	Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	114
2	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	76
3	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	14
4	Satuan Polisi Pamong Praja	127
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	117
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1217
8	Badan Pendapatan Daerah	95
9	Badan Penelitian dan Pengembangan	8
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	194
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1797
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17
15	Dinas Kesehatan	13
16	Dinas Ketahanan Pangan	25
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	34
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5

- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait.
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- i. pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- j. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.31. Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru maka tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan lainnya.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.

- f. penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.32. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Pekanbaru maka tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
 - h. pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan.
 - i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru yang ada di kecamatan.
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Analisa Hasil IKM

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara umum sudah menunjukkan hasil yang sangat baik, sehingga harus dipertahankan. Semua unsur atau indikator memperoleh kinerja pelayanan dengan kategori sangat baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dapat mempertahankan pencapaian kinerja saat ini

f. Rekomendasi Tindakan

Berkaitan dengan hasil indeks tersebut maka terdapat beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

1. Meskipun sudah sangat baik, peningkatan efisiensi waktu dapat terus diupayakan. Perlu dilakukan evaluasi terhadap alur kerja layanan untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan. Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem antrian online atau pelacakan layanan digital dapat membantu memangkas waktu tunggu dan mempercepat proses penyelesaian..
2. Lakukan penyederhanaan dan digitalisasi persyaratan layanan. Publikasi persyaratan yang lebih informatif melalui media sosial, website resmi, dan papan pengumuman juga dapat mempermudah pemahaman masyarakat.
3. Memperkuat mekanisme penanganan pengaduan dengan menyediakan kanal yang lebih responsif dan ramah pengguna, seperti chatbot, layanan hotline, atau aplikasi aduan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan publik.

5.2.1.4. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan yang berfungsi untuk menghimpun pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk pembangunan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru maka tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan lainnya.

a. Jenis Layanan Yang Disediakan

Adapun produk layanan publik dilingkungan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. BPHTB
11. PBB Sektor Perkotaan

b. Jenis Permintaan Layanan Yang diterima

Dari hasil survey yang dilakukan pada 95 orang responden maka jenis pelayanan yang diterima oleh responden terdapat 10 jenis yaitu :

1. BPHTB
2. Pajak Lainnya
3. Pengurusan PBB
4. SPPT PBB
5. Tunggakan PBB

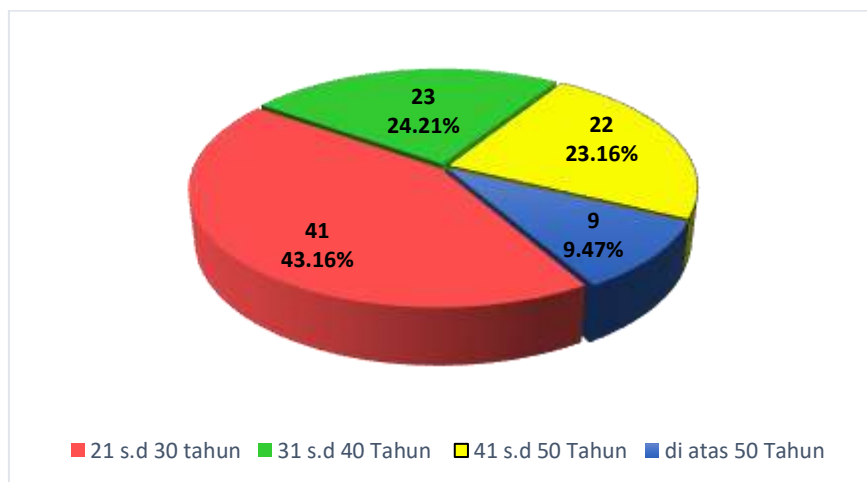
c. Profil Responden

Jumlah responden pada survey kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebanyak 189 orang responden dimana sebanyak 51,58% atau sebanyak 49 orang responden berjenis kelamin laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 48,42% atau sebanyak 46 orang berjenis kelamin perempuan.



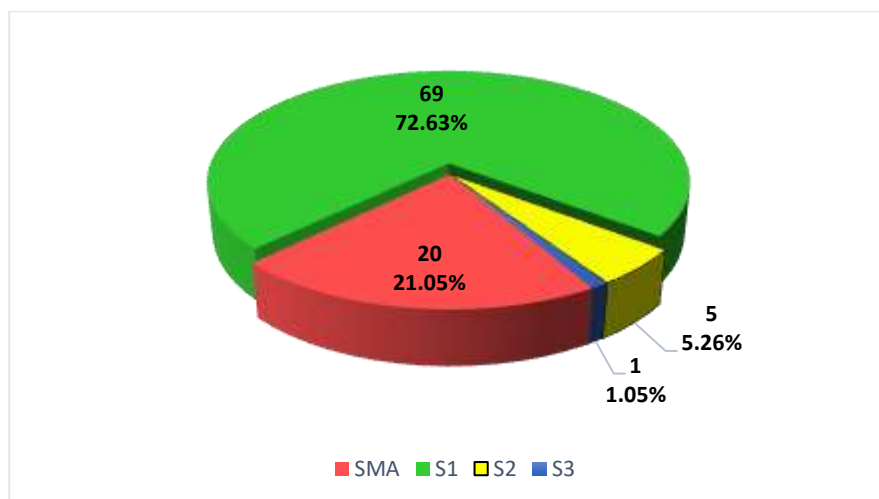
Gambar 5.19. Jenis Kelamin Responden Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah

Untuk kategori usia responden pada Badan Pendapatan Daerah sebesar 1,06% atau sebanyak 2 responden yang berusia di bawah 20 Tahun, sebesar 54,50% atau sebanyak 103 responden yang berusia antara 21 s.d 30 Tahun, 22,22% atau sebanyak 33 responden yang berusia antara 31 s.d 40 Tahun, sebesar 17,46% atau sebanyak 33 responden yang berusia antara yang 41 s.d 50 Tahun, dan sebesar 4,76% atau sebanyak 9 responden yang berusia lebih dari 50 Tahun.



Gambar 5.20. Usia Responden Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah.

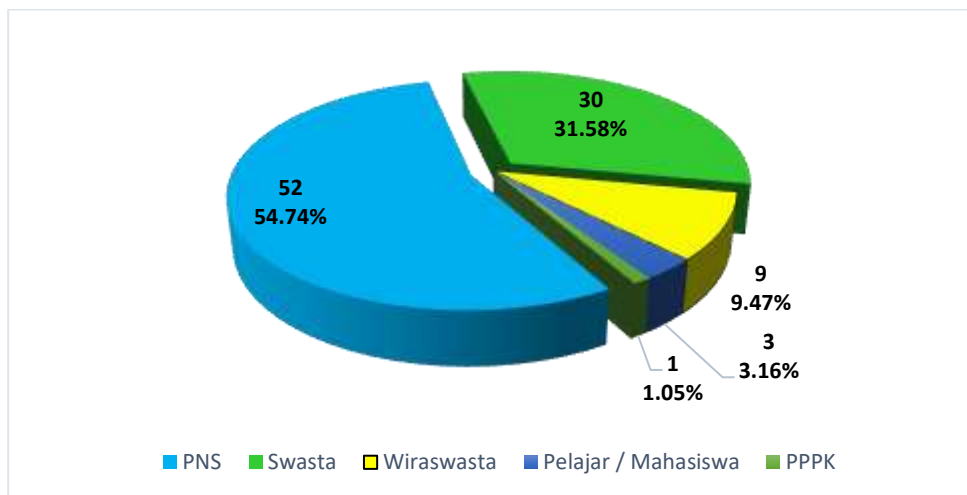
Untuk kategori pendidikan responden pada Badan Pendapatan Daerah sebesar 21,05% atau sebanyak 20 responden dengan tingkat pendidikan SMA, sebesar 72,63% atau sebanyak 69 responden tingkat pendidikan D3/S1, sebesar 5,26% atau sebanyak 5 responden dengan tingkat pendidikan S2 dan sebesar 1,05% atau sebanyak 1 responden dengan tingkat pendidikan S3.



Gambar 5.21. Pendidikan Responden Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah.

Untuk kategori jenis pekerjaan responden pada Badan Pendapatan Daerah sebesar 54,74% atau sebanyak 52 orang responden bekerja sebagai PNS, sebesar 31,58% atau sebanyak 30 orang responden bekerja sebagai pegawai swasta, sebesar 9,47% atau sebanyak 9 orang responden bekerja sebagai wiraswasta, sebesar 3,16% atau sebanyak 3 orang responden bekerja

sebagai pelajar/mahasiswa dan sebesar 1,05% atau sebanyak 1 orang responden bekerja PPPK.



Gambar 5.22. Pekerjaan Responden Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil survey, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pendapatan Daerah, mutu pelayanan berada pada kategori A dengan nilai total sebesar 96,02

Tabel 5.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

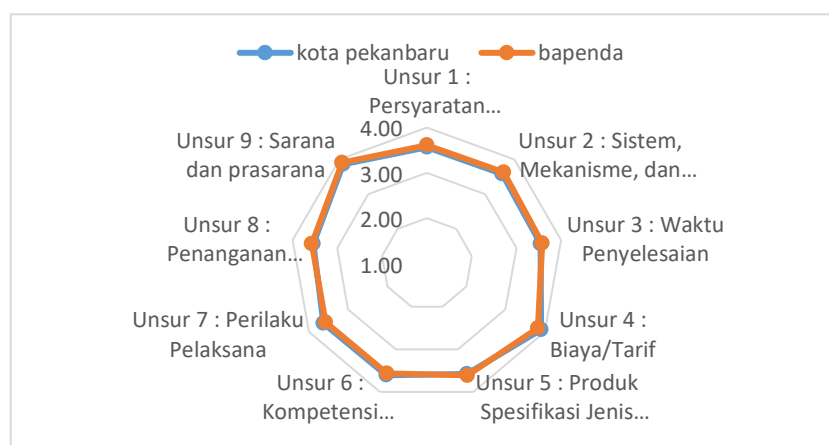
Unsur Layanan	Nilai Rata Rata per unsur	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3.61	90.26	A	SANGAT BAIK
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.63	90.79	A	SANGAT BAIK
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian	3.58	89.47	A	SANGAT BAIK
Unsur 4 : Biaya/Tarif	3.82	95.53	A	SANGAT BAIK
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.61	90.26	A	SANGAT BAIK
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3.57	89.21	A	SANGAT BAIK
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3.57	89.21	A	SANGAT BAIK
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.57	89.21	A	SANGAT BAIK

Unsur Layanan	Nilai Rata Rata per unsur	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Unsur 9 : Sarana dan prasarana	3.91	97.63	A	SANGAT BAIK
IKM	3.65	91.29	A	SANGAT BAIK

Sumber : Hasil Survey, 2025

Pada Tabel 5.9 diatas terlihat bahwasanya IKM pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur 9 yaitu unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata rata sebesar 3,91. Sementara itu unsur lainnya juga berada pada nilai mutu A dengan kinerja pelayanan pada kategori sangat baik. Unsur dengan nilai terendah adalah Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan juga memperoleh nilai yang sangat baik, dengan masing-masing mendapatkan nilai 3,57 (89,21) sehingga tetap perlu ditingkatkan lagi karena merupakan unsur dengan nilai terendah dari unsur unsur lainnya.

Indeks kepuasan yang diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah di komparasi dengan indeks kepuasan Kota Pekanbaru terlihat pada gambar berikut :



Gambar 5.23. Perbandingan IKM Badan Pendapatan Daerah dan IKM Kota Pekanbaru

Dari gambar di atas terlihat bahwa Indeks kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah di komparasi dengan indeks kepuasan Kota Pekanbaru maka hampir semua unsur berada mendekati rata-rata indeks kepuasan Kota Pekanbaru.

e. Analisa Hasil IKM

Pembangunan suatu kota tidak bisa dilepaskan dari unsur biaya termasuk Kota Pekanbaru. Pembiayaan Kota Pekanbaru berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana sumber pendapatan ini berasal dari pajak, retribusi, keuntungan BUMD dan sumber lainnya. Badan Pendapatan Daerah memegang peranan penting di dalam mengumpulkan sumber pendapatan tersebut. Hasil survey ini memperlihatkan bahwa layanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tergolong sangat Baik. Responden memberikan penilaian yang rendah pada Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Hal ini memberikan makna bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus melakukan perbaikan yang signifikan pada tiga aspek ini untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

f. Rekomendasi Kebijakan

Berkaitan dengan hasil indeks tersebut maka terdapat beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

1. Lakukan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pelayanan, baik teknis maupun soft skill, agar pengetahuan dan keahlian mereka tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi pelayanan publik.
2. Perkuat budaya pelayanan prima melalui coaching, reward and recognition, serta penguatan etika pelayanan. Penerapan standar pelayanan ramah dan humanis juga dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap petugas.
3. Tingkatkan aksesibilitas dan kemudahan kanal pengaduan masyarakat, seperti dengan optimalisasi media sosial, website, atau aplikasi aduan digital. Pastikan seluruh pengaduan tertangani dengan cepat dan disertai umpan balik yang jelas.

BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Kota Pekanbaru dari hasil survey maka diperoleh angka indeks sebesar 91,12 dan masuk pada kategori A. Hasil ini diperoleh dari perhitungan yang dilakukan pada sebanyak 9.392 orang responden.
2. Indeks pelayanan dasar adalah sebesar 88,47 dengan mutu A, sedangkan Indeks pelayanan non dasar adalah sebesar 93,79 dengan Mutu A, selanjutnya nilai indeks yang diperoleh untuk pelayanan pilihan Kota Pekanbaru adalah sebesar 85,32 dengan mutu B.
3. OPD dengan IKM terbaik terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Meski hasil dari pelayanan yang dihasilkan belum maksimal tetapi hasil yang di pelayanan melebihi hasil dari rata rata IKM yang ada di Pekanbaru terutama tentang perilaku pelaksanaan jasa yang diberikan oleh OPD.
4. Unsur dengan nilai terendah pada unsur terutama pada Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Unsur 3 : Waktu Penyelesaian dan Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan. Ketiga unsur tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

6.2. Saran

Demi menjaga kepercayaan masyarakat akan pelayanan maka Aspek-aspek yang harus dijadikan prioritas utama dalam perbaikan pelayanan

DAFTAR PUSTAKA

- Hoffman, K.D. and J.E.G. Bateson. (1997). *Essentials Of Service Marketing*. Fort Worth: The Dryden Press
- Mowen. (1995). *Perilaku Konsumen*. Pustaka Ilmu : Jakarta.
- Mendelsohn, J. D., 1998. Don't measure customer satisfaction - manage it. *Marketing News*, 26 October, p. 42
- Dutka (1994:41). *Atribut – Atribut Dari Konsumen Secara Universal*. , Erlanggan , Glora. Aksara Pertama
- Osborne.D and T.Gaebler, 1992. *Reinventing Government; How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, Rending Mass: Addison-Wesley.
- A. Parasuraman, valarie A. Zeithaml, Leornard. Berry, 1985, "A Conceptual Model of Service Quality and Implication for Future Research" (*Journal of Marketing*).
- A Parasuraman, valarie A. Zeithmal, Leornard L. Berry, 1990, "Delivering Quality Service : Balancing Customer Perception and Expectations" (*The Free Press*).
- Utomo, Warsito, 1997. *Peranan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Volume I.
- Fandi, Tjiptono, 1995, *Strategi Pemasaran*, Edisi Pertama, Andi Offset. Yogyakarta.
- Zeithaml, A.Valarie, Parasuraman, Berry. 1990.*Delivering Quality Service*. New. York: Free Press.
- Walsh, Kieron. 1991. *Quality And Public Service*. Dalam *Majalah Public Administration*. Volume 69
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017

Lampiran I : Nilai IKM berdasarkan Peringkat Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	2025	2024	2023	2022
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.95	98.70	96.16	91.20
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.52	97.12	89.73	90.10
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93.43	96.48	89.32	90.05
4	Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	93.40	84.13	91.81	91.93
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	93.38	95.09	86.93	87.69
6	Badan Pendapatan Daerah	91.29	96.02	94.40	81.03
7	Badan Penelitian dan Pengembangan	91.15	90.97	94.31	97.70
8	Kecamatan Bukitraya	91.04	87.54	86.27	83.56
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.95	92.73	83.48	82.45
10	Kecamatan Rumbai	90.94	84.32	80.52	79.17
11	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	90.68	85.43	85.78	88.76
12	Kecamatan Rumbai Barat	90.08	83.33	82.85	91.75
13	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	89.88	88.06	81.92	81.28
14	Dinas Sosial	89.65	79.32	83.70	83.88
15	Kecamatan Tuah Madani	89.45	88.40	88.07	87.89
16	Kecamatan Limapuluh	89.12	85.89	85.64	83.05
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	89.05	94.04	83.11	83.18
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88.82	92.62	85.79	82.81
19	Kecamatan Bina Widya	88.34	85.74	83.19	83.46
20	Kecamatan Tenayan Raya	87.93	81.29	85.34	84.40
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	87.91	87.00	88.89	82.45
22	Kecamatan Payung Sekaki	87.90	89.30	88.28	92.97

Lampiran II Foto-Foto Kegiatan

SKM KOTA PEKANBARU



#IKM2025









